

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada dasarnya merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki karakteristik yang sama dalam segi pelayanan. Hal ini karena sebagian besar wilayah yang ada di Kota Sungai Penuh, merupakan wilayah dari Kabupaten Kerinci pada saat pemekaran belum dilakukan. Pada tahun 2005 Kota Sungai Penuh masih menjadi kesatuan dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang memiliki tingkat kecukupan pelayanan minimal rata-rata diatas 65% untuk sarana pendidikan SD, 50% untuk pendidikan SMP, dan dibawah 30% untuk pendidikan SMA. Setelah adanya pemekaran rata-rata pelayanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengalami perubahan yang dinamis, terutama untuk Kecamatan Sungai Penuh yang memiliki tingkat kecukupan layanan pendidikan SMP dan SMA nya pada tahun 2015 mencapai lebih dari 300%.

Adanya perbedaan tingkat kecukupan layanan telah mempengaruhi perbedaan tingkat pemerataan pelayanan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Meskipun tingkat pemerataan pelayanan di Kabupaten Kerinci berada dalam kategori baik untuk setiap jenjang pendidikan, namun untuk persebaran kecukupan layanannya relatif rendah. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh memiliki tingkat pemerataan layanan yang relatif buruk, namun untuk persebaran kecukupan layanan menunjukkan kondisi yang lebih baik di bandingkan dengan Kabupaten Kerinci. Hal ini dibuktikan dengan besaran nilai gini untuk sarana pendidikan SD di angka 0.08 pada tahun 2005 menjadi 0.16 untuk tahun 2015 di Kabupaten Kerinci, dan 0.66 pada tahun 2010 menjadi 0.40 pada tahun 2015 di Kota Sungai Penuh. Sedangkan untuk sarana pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Kerinci berada di angka 0.11 dan 0.32 untuk tahun 2005, dan berubah menjadi 0.15 dan 0.38 di tahun 2015. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 memiliki indeks gini SMP dan SMA sebesar 0.20 dan 0.39 dan mengalami perubahan pada tahun 2015 sebesar 0.40 untuk SMP dan 0.46 untuk SMA.

Dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan untuk tingkat kecukupan dan pemerataan pelayanan sarana pendidikan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, terutama untuk jenjang pendidikan yang dibawah oleh pemerintah kabupaten/kota yakni SD dan SMP diketahui bahwa hanya pelayanan pendidikan SD yang mampu dioptimalkan

pelayanannya oleh pemerintah yang memiliki kewenangan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP memiliki rata-rata tingkat kecukupan pelayanan dan pemerataan yang relatif kurang cukup, hal ini sama dengan kondisi yang terjadi di jenjang pendidikan SMA yang kewenangannya dikelola oleh pemerintah provinsi jambi. Dari kedua wilayah ini menunjukkan adanya perbedaan yang dinamis setelah pembentukan wilayah otonom Kota Sungai Penuh. Meskipun secara kewilayahan berasal dari satu wilayah yang sama, namun terdapat perbedaan dalam hal pengelolaan wilayah terutama setelah adanya pembentukan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008.

5.2 Rekomendasi

Untuk mewujudkan salah-satu tujuan dari dilakukannya pemekaran wilayah agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan pelayanan pendidikan untuk masing-masing wilayah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penulis memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yaitu, sebagai berikut:

Memaksimalkan pelayanan pendidikan dengan mencukupi standar minimal pelayanan untuk daya tampung jumlah murid dengan memberlakukan sistem rayonisasi untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemerataan murid untuk setiap sekolah yang telah disediakan.